Sebalas Maret Universitas – Surakarta

Eks-Keresidenan Surakarta Menyongsong Otonomi Daerah: Permasalahan,
Kesiapan, Peluang dan Tantangan
(The Former Residency of Surakarta Faces Regional Autonomy: Problems,
Preparations, Opportunities and Challenges)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meningkatkan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

Eks-Karesidenan Surakarta Menyongsong Otonomi Daerah: Permasalahan, Kesiapan, Peluang dan Tantangan¹⁾

=====
**Oleh: Drs. Lilik Dwi Sunardianto, M.Ec²⁾
Drs. Mulyanto, ME²⁾**

A. Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia, [yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan], merupakan salah satu isu yang akhir-akhir ini sangat mendominasi pembicaraan masyarakat di Indonesia, khususnya setelah ditetapkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut UU No. 22/1999, pertimbangan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pertimbangan di atas, harus diakui bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah selama masa Orde Baru, tidak melibatkan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat di daerah. Hal ini terlihat dari kurang terlibatnya masyarakat pada proyek-proyek pembangunan di daerah, serta banyak kegiatan pembangunan yang ada di daerah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Sebagai akibatnya, masyarakat di daerah merasakan adanya ketidakadilan pemerintah (Pemerintah Pusat di Jakarta) dalam melaksanakan pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, dengan munculnya kedua undang-undang di atas diharapkan dapat mendorong langkah maju dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan merata melalui kebijakan otonomi daerah.

¹⁾Disampaikan dalam Lokakarya Tahap II: "Strengthening Regional University Capacity to Support Decentralization" yang diselenggarakan atas kerjasama IRIS-LPEM FE-UI di Hotel Treva International Jakarta, 5-10 Juni 2000.

²⁾Dosen Jurusan Manajemen dan Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan otonomi daerah mendesak untuk dilaksanakan, adalah: (i) Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, hanya dinikmati oleh penduduk yang bermukim di kawasan tertentu (khususnya di Pulau Jawa) dan di daerah-daerah sekitar Jakarta, sementara pembangunan di beberapa kawasan lain dilalaikan. Dengan kata lain pembangunan yang selama ini terjadi, terlalu banyak menimbulkan 'mis-allocations' sumber daya pembangunan dan menimbulkan banyak peluang terjadinya korupsi di tingkat Pemerintah Pusat. Korban pembangunan yang salah pada masa Orde Baru, secara keseluruhan ditanggung oleh rakyat dengan ujud antara lain berupa hutang luar negeri yang sangat besar untuk ukuran Negara Sedang Berkembang. (ii) Daerah-daerah yang kaya SDA (Sumber Daya Alam), seperti Riau, Kaltim, Papua/Irja, Aceh, Sumsel, Kalteng, dan sebagainya tidak mendapatkan bagi hasil secara memadai untuk pembangunan di daerahnya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hasil kekayaan SDA dari daerah-daerah tersebut, hanya dinikmati oleh beberapa golongan tertentu yang semasa ORBA berada di lingkaran kekuasaan. (iii) Berbagai bentuk ketimpangan muncul, baik berupa ketimpangan ekonomi (yang ditunjukkan oleh besaran PDRB, aliran modal/investasi [baik berupa PMA maupun PMDN], alokasi kredit perbankan, dan lainnya) maupun dalam arti sosial (yang ditunjukkan oleh kualitas penduduk [yang disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pendidikan maupun kesehatan], kemajuan peradaban, mobilitas informasi, dan sebagainya).

Sementara itu, tanggapan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dalam undang-undang diisyaratkan mulai berlaku pada 7 Mei 2001, secara umum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang pro dan kontra. Pokok perbedaan pandangan ini pada umumnya terjadi antara kelompok masyarakat (pemerintah) yang merasa siap dan merasa tidak siap untuk melaksanakan otonomi daerah. Masyarakat dan pemerintah yang merasa bahwa daerahnya telah siap menghadapi otonomi daerah, pada umumnya adalah masyarakat daerah yang memiliki kekayaan SDA yang cukup dan memiliki penduduk yang relatif sedikit. Sementara itu mereka yang tidak siap adalah mereka yang miskin SDA dan berpenduduk sangat padat. Terlepas dari konteks siap tidaknya daerah-daerah di Eks-Karesidenan Surakarta, tulisan ini akan membahas bagaimana Eks-Karesidenan Surakarta menghadapi dan menyongsong pemberlakuan otonomi daerah.

Walaupun kondisi sosial ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta kemungkinan tidak seburuk dibanding dengan kebanyakan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa, persoalan yang berkaitan dengan kesiapan menyambut pelaksanaan otonomi daerah juga tidak dapat

dianggap mudah dan sepele. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa hampir semua DATI II di Eks-Karesidenan Surakarta tidak ada yang memiliki kekayaan SDA secara menonjol, yang dapat dijadikan andalan dalam proses bagi hasil yang berasal dari SDA melalui pos Dana Perimbangan di dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Oleh karenanya keberhasilan daerah-daerah di Eks-Karesidenan Surakarta banyak ditentukan oleh seberapa jauh daerah-daerah tersebut dapat menggali potensi di luar kekayaan SDA disertai dengan peningkatan kualitas SDM, baik bagi aparat di semua lini pemerintahan maupun peningkatan SDM bagi kebanyakan penduduknya, yang umumnya masih sangat rendah.

B. Keadaan Sosial Ekonomi Eks-Karesidenan Surakarta

Eks-Karesidenan Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) DATI II yang meliputi: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Salah satu bentuk kerjasama yang terjalin selama ini, berada di bawah naungan program yang bernama: Subosuka Wonosraten, yang tidak lain merupakan kependekan dari seluruh anggota DATI II yang disebutkan di atas. Bersama dengan 28 DATI II yang lain, Eks-Karesidenan Surakarta berada di bawah naungan Propinsi Jawa Tengah (Jateng).

Dari segi luas wilayah di Eks-Karesidenan Surakarta, Wonogiri merupakan DATI II yang mempunyai wilayah paling luas, diikuti oleh Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta. Dengan mempertimbangkan data jumlah penduduk yang ada pada tahun 1997, DATI II Surakarta merupakan daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yang diikuti oleh Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Khusus daerah DATI II Kodya Surakarta, kepadatan penduduk telah meningkat menjadi 12.329 orang per-km² pada tahun 1998. Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan penduduk di DATI II Surakarta, yaitu banyaknya jumlah penduduk antara siang dan malam yang sangat jauh berbeda. Jumlah penduduk pada siang hari ada yang memperkirakan hingga sekitar 2 juta orang. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pelajo/peboru yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Kodya Surakarta, baik berkaitan dengan usaha di sektor perdagangan maupun kegiatan di sektor lainnya. Tingginya tingkat pelajo/peboru ini sedikit banyak telah memberikan andil terhadap tingkat kerawanan sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi di Surakarta.

Tabel 2.1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1997

Kabupaten/Kotamadya	Luas Daerah [km ²]	Jumlah Penduduk	Kepadatan [penduduk per-km ²]
01. Jawa tengah	32.544,12	29.907.476	919
02. Surakarta	44,03	519.470	11.798
03. Boyolali	1.015,07	857.207	844
04. Sukoharjo	466,66	715.158	1.533
05. Karanganyar	772,20	739.321	957
06. Wonogiri	1.822,37	973.752	534
07. Sragen	946,49	841.846	889
08. Klaten	655,56	1.099.458	1.677

Sumber : BPS Jateng (1999). Jawa Tengah Dalam Angka 1998, hal. 74.

Dari sisi tingkat pendidikan penduduk di Eks-Karesidenan Surakarta, secara keseluruhan dapat dikatakan rendah. Sebagai gambaran untuk DATI II Surakarta saja, dari jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas pada tahun 1998 yang jumlahnya 464.129 orang; yang Tamat Akademi/PT sebesar 23.745 orang (5,12%); Tamat SLTA sebesar 83.016 orang (17,89%); Tamat SLTP sebesar 98.607 orang (21,25%); Tamat SD sebesar 112.193 orang (24,17%); Tidak Tamat SD sebesar 46.519 orang (10,02%); Belum Tamat SD sebesar 66.125 orang (14,25%); serta Tidak Sekolah sebesar 33.924 orang (7,31%). Gambaran selengkapnya lihat tabel 2.2. Selain tingkat pendidikan yang rendah, penyebaran penduduk menurut tingkat pendidikan per-kecamatan di berbagai DATI II Eks-Karesidenan Surakarta diduga juga tidak merata.

Tabel 2.2. Banyaknya Penduduk Berumur 5 Tahun Ke - Atas, Menurut Tingkat Pendidikan Per-Kecamatan di Surakarta Tahun 1998

Tingkat Pendidikan	Lawa- yan	Sere- ngan	Pasar Kliwn	Jebres	Banjar- sari	Jumlah
- Tamat Akademi/PT	4.809	4.330	4.032	4.714	5.860	23.745
- Tamat SLTA	20.415	8.429	16.755	15.161	22.256	83.016
- Tamat SLTP	21.549	11.993	14.944	24.872	25.249	98.607
- Tamat SD	18.805	14.137	15.260	27.744	36.247	112.193
- Tidak Tamat SD	8.384	5.101	7.869	10.954	14.211	54.519
- Belum Tamat SD	9.905	5.747	13.861	13.613	22.999	66.125
- Tidak Sekolah	8.064	2.226	3.351	12.001	8.242	33.924
- J u m l a h	91.931	52.003	76.072	109.059	135.064	464.129

Sumber : BPS Surakarta (1999). Kotamadya Surakarta Dalam Angka 1998, hal. 91 diolah kembali.

Sementara itu gambaran untuk DATI II Sragen pada tahun 1998, menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang berumur 5 tahun keatas yang jumlahnya sebesar 846.841 orang; yang Tamat Akademi/PT sebesar 5.987 orang (0,71%); Tamat SLTA sebesar 56.736 orang (6,70%); Tamat SLTP sebesar 96.116 orang (11,35%); Tamat SD sebesar 256.906 orang (30,34%); Tidak Tamat SD sebesar 137.793 orang (16,27%); Belum Tamat SD sebesar 219.011 orang (25,86%); serta Tidak Sekolah sebesar 74.292 orang (8,77%).

Gambaran data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) DATI II Eks-Karesidenan Surakarta baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 1993, dapat dilihat pada tabel 2.3. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kodya DATI II Surakarta mempunyai PDRB yang paling besar, yaitu sebesar Rp 2,22 trilyun (harga berlaku) dan sebesar Rp 1,23 trilyun (harga konstan). Besarnya PDRB ini sekaligus juga merupakan penghasil PDRB-per-kapita yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp 4,11 juta per-tahun per-kapita (harga berlaku) dan sebesar Rp 2,28 juta per-tahun per-kapita (harga konstan). PDRB di Eks-Karesidenan Surakarta yang paling rendah, yaitu PDRB DATI II Sragen, namun PDRB per-kapita yang paling kecil yaitu PDRB per-kapita DATI II Wonogiri. Kecilnya PDRB per-kapita di Wonogiri disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk, yang menempati urutan terbesar di Eks-Karesidenan Surakarta yaitu sebesar 1,09 juta jiwa.

Bila dilihat dari sisi rincian kontribusi pembentuk PDRB menurut sektor ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut):

- i. Sektor Pertanian memberikan andil/peranan yang sangat besar untuk DATI II Wonogiri (59,21%), Sragen (45,57%) dan Boyolali (39,46%). Khusus untuk DATI II Boyolali, sumbangan terhadap sektor Pertanian selain yang berasal dari Tanaman Bahan Makanan juga berasal dari Peternakan. DATI II Boyolali terkenal dengan peternakan Sapi Perah-nya.
- ii. Sektor Industri Pengolahan memberikan andil/peranan yang besar untuk DATI II Karangayar (41,84%), demikian pula untuk DATI II Surakarta (33,00%). Sementara kontribusi sektor ini terhadap PDRB di Sukoharjo; Boyolali; dan Sragen masing-masing sebesar 27,50%; 16,49%; dan 15,09%. Khusus Wonogiri kontribusi dari sektor ini paling rendah yaitu sebesar 4,81%. Rendahnya kontribusi dari sektor ini, diduga sebagai akibat dari besarnya minat masyarakat/penduduk Wonogiri untuk merantau ke kota-kota besar lain di Indonesia dibanding dengan tetap tinggal di daerahnya.

- iii. Sumbangan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB di Eks-Karesidenan Surakarta semuanya berada di atas 15%, kecuali untuk DATI II Sragen (14,40%) dan Wonogiri (8,72%). Andil yang besar dari sektor ini dihasilkan dari kegiatan Perdagangan, sementara dari hasil Hotel dan Restoran masih memberikan sumbangan yang relatif kecil.
- iv. Sumbangan sektor Pengangkutan terhadap PDRB yang cukup besar, terjadi di DATI II Surakarta (10,76%) dan di Wonogiri (9,62%). Sementara di DATI II yang lain masih di bawah 5%. Andil yang besar dari sektor ini dihasilkan dari kegiatan Pengangkutan.
- v. Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; secara keseluruhan masih memberikan andil yang cukup kecil terhadap PDRB di Eks-Karesidenan Surakarta.

Tabel 2.3. PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per-Kapita Menurut Harga Berlaku & Harga Konstan 1993, Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1998

Kabupaten/Kotamadya	PDRB [Juta Rupiah]	Jumlah Penduduk	PDRB-Per Kapita
Harga Berlaku			
01. Jawa Tengah	84.227.031,45	30.405.877	2.770.090,51
02. Surakarta	2.220.384,20	540.644	4.106.858,00
03. Boyolali	2.017.856,26	909.623	2.218.343,49
04. Sukoharjo	2.064.458,52	768.421	2.686.624,29
05. Karanganyar	2.158.988,91	771.232	2.799.402,66
06. Wonogiri	1.603.375,43	1.091.462	1.469.016,00
07. Sragen	1.525.044,33	882.458	1.728.177,81
08. Klaten	-	-	-
Harga Konstan 1993			
01. Jawa Tengah	37.793.149,49	30.405.877	1.242.955,42
02. Surakarta	1.233.018,44	540.644	2.280.647,00
03. Boyolali	874.143,43	909.623	960.995,30
04. Sukoharjo	1.061.616,80	768.421	1.381.556,20
05. Karanganyar	1.109.425,03	771.232	1.438.510,11
06. Wonogiri	742.361,47	1.091.462	680.153,00
07. Sragen	664.414,00	882.458	752.912,89
08. Klaten	-	-	-

Sumber : 1. BPS Jateng (1999). PDRB Jawa Tengah 1998, diolah kembali.

2. BPS ---- (1999). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) -----, diolah kembali.

-----: Menunjukkan DATI II di Eks-Karesidenan Surakarta.

Tabel 2.4. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1998 (dalam persen)

Lapangan Usaha	Ska	Byl	Skh	Kra	Wng	Srg	Klt
1. Pertanian	2,18	39,46	27,43	20,87	59,21	45,57	-
- Tanaman Bhn Makanan	0,17	26,29	21,01	14,42	53,45	38,65	-
- Tanaman Perkebunan	0,01	1,76	1,45	1,30	3,78	2,34	-
- Peternakan	2,00	10,98	3,99	4,80	1,15	2,93	-
- Kehutanan	-	0,29	0,83	0,24	0,01	0,60	-
- Perikanan	0,00	0,13	0,15	0,11	0,07	1,04	-
2. Pertamb. & Penggalian	0,06	0,60	1,17	0,99	0,90	1,84	-
- Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-
- Penggalian	0,06	0,60	-	-	0,90	-	-
3. Industri Pengolahan	33,00	16,49	27,50	41,84	4,81	15,09	-
- Industri Besar & Sdang	29,92	15,54	-	-	2,60	-	-
- Industri Kecil	2,03	0,49	-	-	1,20	-	-
- Industri Rumah Tangga	1,05	0,46	-	-	1,01	-	-
4. Llst. Gas & Air Bersih	1,90	0,45	0,90	1,15	0,54	0,83	-
- Listrik	1,6	0,41	-	-	0,43	-	-
- Gas	-	-	-	-	-	-	-
- Air Bersih	0,3	0,04	-	-	0,11	-	-
5. Bangunan / Konstruksi	10,41	3,15	4,21	1,75	3,11	5,01	-
6. Perdag., Hotel & Restr	20,81	26,48	19,85	15,59	8,72	14,40	-
- Perdagangan	18,18	24,83	-	-	8,56	-	-
- Hotel	0,84	0,01	-	-	0,01	-	-
- Restoran	1,79	1,64	-	-	0,15	-	-
7. Pengangk. & Komuniks	10,76	2,85	4,42	3,12	9,62	3,82	-
- Pengangkutan	7,97	2,67	-	-	9,21	-	-
- Komunikasi	2,79	0,18	-	-	0,41	-	-
8. Lbg Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	9,34	5,24	3,57	3,12	3,70	3,79	-
- Bank	4,45	0,33	-	-	0,92	-	-
- LKBB dan Js Penunjang	2,80	0,34	-	-	0,78	-	-
- Sewa Bangunan	1,96	4,04	-	-	1,95	-	-
- Jasa Perusahaan	0,13	0,53	-	-	0,25	-	-
9. Jasa-Jasa	11,54	6,68	10,95	12,22	9,39	9,65	-
- Pemrth. Um. & Perthan	7,81	6,06	-	-	6,87	-	-
- Swasta	3,73	0,62	-	-	2,52	-	-
J u m l a h	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

Sumber : BPS ---- (1999). PDRB -----1998, diolah kembali.
----- Menunjukkan DATI II di Eks-Karesidenan Surakarta.

Bila dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 1998, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kodya Surakarta dominan pada lapangan pekerjaan Buruh Industri (sebesar 19,03%) dan Buruh Bangunan (sebesar 16,11%) dari total penduduk berusia 10 tahun ke atas yang jumlahnya 377.641 orang.

Sementara itu untuk DATI II Boyolali, dominan pada lapangan pekerjaan sebagai Petani Sendiri (sebesar 26,72%) dan Buruh Tani (sebesar 15,00%) dari total penduduk berusia 10 tahun ke atas yang jumlahnya 725.967 orang. Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di Wonogiri, yaitu sebesar 25,87% bekerja sebagai Petani Sendiri dan sebesar 17,25% bekerja sebagai Buruh Tani dari total penduduk berusia 10 tahun ke atas yang jumlahnya 798.488 orang. Khusus untuk DATI II Karangayar dan Sragen menunjukkan kejadian yang bertolak belakang dengan yang terjadi di Boyolali dan Wonogiri, yaitu bahwa penduduk yang bekerja sebagai Buruh Petani lebih banyak dibanding dengan Petani Sendiri. Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas di Karanganyar sebanyak 574.359 orang, sedang di Sragen sebanyak 616.709 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Distribusi Penduduk Usia 10 Tahun Ke-Aatas Menurut Lapangan Pekerjaan di Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1998 (dalam persen)

Lapangan Pekerjaan	Ska	Byl	Skh	Kra	Wng	Srg	Klt
1. Petani Sendiri	0,28	26,72	-	16,36	25,87	21,88	-
2. Buruh Tani	0,24	15,00	-	16,74	17,25	33,95	-
3. Nelayan	-	0,01	-	-	0,07	0,09	-
4. Pengusaha	2,51	0,93	-	1,33	2,13	2,09	-
5. Buruh Industri	19,03	5,14	-	8,81	5,04	5,94	-
6. Buruh Bangunan	16,11	3,40	-	6,50	5,59	4,66	-
7. Pedagang	6,00	2,93	-	5,29	4,01	4,83	-
8. Transportasi	5,40	0,86	-	0,70	1,21	0,94	-
9. PNS/ABRI	6,69	2,96	-	3,22	3,08	2,17	-
10. Pensiunan	5,30	0,73	-	1,34	0,67	0,49	-
11. Lainnya	38,46	41,31	-	39,67	35,07	22,97	-
J u m l a h	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-

Sumber : BPS ---- (1999). -----Dalam Angka 1998, diolah kembali.
----- Menunjukkan DATI II di Eks-Karesidenan Surakarta.

C. Situasi dan Kondisi Pemerintah Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta: Beberapa Kasus

Berdasar pada data yang ada pada tahun 1998, struktur Pemerintahan Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta yang dilihat dari besaran Jumlah Kecamatan, Desa/Kalurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT); menunjukkan adanya variasi yang sangat signifikan. Kodya Surakarta merupakan DATI II yang struktur pemerintahannya paling sederhana. Namun karena tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi, disertai dengan posisinya sebagai daerah perkotaan; permasalahan yang dihadapinya tidak dapat dikatakan sederhana. Jumlah kecamatan yang ada di Kodya Surakarta sebanyak 5 buah, sementara jumlah kecamatan yang paling banyak ada pada DATI II Wonogiri, yaitu sebanyak 24 buah. DATI II Boyolali, Sragen dan Karanganyar dapat dikatakan mempunyai struktur pemerintahan yang hampir serupa. Di lain pihak, DATI II Sukoharjo mempunyai struktur pemerintahan yang berada di tengah-tengah, dengan jumlah kecamatan sebanyak 12 buah, kelurahan/desa sebanyak 167 buah serta RW dan RT masing-masing sebanyak 1.402 buah dan 4.104 buah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kalurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1998

Kondisi Pemerintahan	Ska	Byi	Skh	Kra	Wng	Srg	Klt
- Jumlah Kecamatan	5	19	12	17	24	20	-
- Jumlah Desa/Kalurahan	51	267	167	177	294	207	-
- Jumlah RW	590	1.332	1.402	1.796	-	1.555	-
- Jumlah RT	2.603	6.026	4.104	6.015	-	5.060	-

Sumber : BPS (1999). --- Dalam Angka 1998, diolah kembali.
--- Menunjukkan DATI II di Eks-Karesidenan Surakarta.

Sementara itu, dari sisi jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) baik Pusat maupun PNS DO (Daerah Otonom) yang ada di Kodya Surakarta pada tahun 1998 yang terdaftar sebagai peserta TASPEN jumlahnya ada 18.315 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya bergolongan III (sebesar 10.382 atau 56,69%). Bila dilihat dari persentase PNS DO terhadap total PNS, ada sekitar 6.298 orang (atau sebesar 34,39%). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberlakuan program Otonomi Daerah sedikit banyak akan berpengaruh pada PNS yang statusnya sebagai PNS Otonom. Gambaran mengenai jumlah PNS yang ada di Kodya Surakarta dan DATI II Sukoharjo, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pusat dan PNS DO (Daerah Otonom) Dirinci Menurut Golongan di Kotamadya DATI II Surakarta dan DATI II Sukoharjo Tahun 1998

Golongan dan Jenis PNS	PNS Pusat	PNS DO	Jumlah
- SURAKARTA*)			
1. Golongan I	962 (8,00)	346 (5,49)	1.308 (7,14)
2. Golongan II	3.966 (33,00)	2.016 (32,01)	5.982 (32,66)
3. Golongan III	6.729 (55,99)	3.653 (58,00)	10.382 (56,69)
4. Golongan IV	360 (2,99)	283 (4,49)	643 (3,51)
Jumlah	12.017 (100,0)	6.298 (100,0)	18.315 (100,0)
- SUKOHARJO**)			
1. Golongan I	79 (5,87)	147 (15,39)	226 (9,82)
2. Golongan II	806 (59,88)	544 (56,96)	1.350 (58,67)
3. Golongan III	445 (33,06)	255 (26,70)	700 (30,42)
4. Golongan IV	16 (1,19)	9 (0,94)	25 (1,09)
Jumlah	1.346 (100,0)	955 (100,0)	2.301 (100,0)

Catatan : *) PNS yang terdaftar sebagai peserta TASPEN.

***) PNS yang bekerja di lingkungan Pemda Sukoharjo.

Sumber : BPS ---- (1999). ---- Dalam Angka 1998, diolah kembali.
----- Menunjukkan DATI II di Surakarta dan Sukoharjo.

Dalam BAB IV, Pasal 11, Ayat 2 UU No. 22/1999, disebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kotamadya meliputi 11 (sebelas) kegiatan, yaitu: (1) Pekerjaan Umum; (2) Kesehatan; (3) Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Pertanian; (5) Perhubungan; (6) Industri dan Perdagangan; (7) Penanaman Modal; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Koperasi; serta (11) Tenaga Kerja. Makna dari ketentuan di atas yaitu bahwa suatu Kabupaten atau Kotamadya di suatu daerah, diberi keleluasaan yang lebih besar lagi dalam menggali potensi dan kemampuan daerahnya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, selain dari yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut di atas. Dengan demikian jika di suatu daerah Kabupaten/Kotamadya dianggap perlu untuk menambah/mendirikan suatu dinas tertentu, hal ini sangat diperbolehkan; begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya antara DATI II yang satu dengan DATI II yang lain tidak harus mempunyai jumlah dan jenis dinas yang sama/seragam. Sebagai gambaran jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya DATI II Surakarta dan DATI II Wonogiri pada tahun 1998, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3. Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 1998

Kondisi Pemerintahan	Ska	Byl	Skh	Kra	Wng	Srg	Kit
SETWILDA	496	-	-	-	-	-	-
- Setwilda	3	-	-	-	-	-	-
- Bag. Tata Pemerintahan	93	-	-	-	-	-	-
- Bag. Pemerint. Kalurahan.	17	-	-	-	-	-	-
- Bag. Perkotaan	11	-	-	-	-	-	-
- Bag. Hukum	17	-	-	-	-	-	-
- Bag. Humas	15	-	-	-	-	-	-
- Bag. Perekonomian	24	-	-	-	-	-	-
- Bag. Penyusunan Program	29	-	-	-	-	-	-
- Bag. Sosial	31	-	-	-	-	-	-
- Bag. Lingkungan Hidup	15	-	-	-	-	-	-
- Bag. Kepegawaian	40	-	-	-	-	-	-
- Bag. Keuangan	45	-	-	-	-	-	-
- Bag. Organisasi	18	-	-	-	-	-	-
- Bag. Perlengkapan	20	-	-	-	-	-	-
- Bag. Umum	89	-	-	-	-	-	-
- Sekretariat Korpri	4	-	-	-	-	-	-
- Sekretariat DPRD	25	-	-	-	4	-	-
DINAS-DINAS	1.402	-	-	-	-	-	-
- Dinas Kesehatan	486	-	-	-	337	-	-
- Dinas Sosial	67	-	-	-	57	-	-
- Dinas Pekerjaan Umum	133	-	-	-	189	-	-
- Dinas Pariwisata	76	-	-	-	45	-	-
- Dinas Pengelolaan Pasar	164	-	-	-	-	-	-
- Dinas Pendapatan Daerah	137	-	-	-	165	-	-
- Dinas Pertanian	-	-	-	-	106	-	-
- Dinas Perkebunan	-	-	-	-	68	-	-
- Dinas Perhut. & Konservasi	-	-	-	-	93	-	-
- Dinas Peternakan	60	-	-	-	71	-	-
- Dinas Perikanan	45	-	-	-	49	-	-
- Dinas Tata Kota	45	-	-	-	-	-	-
- Dinas Kebersh. & Pertanm	103	-	-	-	79	-	-
- Dinas Perumahan	28	-	-	-	-	-	-
- Dinas Pendk & Kebudayaan	58	-	-	-	-	-	-
KANTOR-KANTOR	314	-	-	-	-	-	-
- Kantor Sosial Politik	31	-	-	-	-	-	-
- Kantor BAPPEDA	60	-	-	-	-	-	-
- Kantor ITWILKOD	57	-	-	-	39	-	-
- Kantor Mawil Hansip	34	-	-	-	13	-	-
- Kantor BP-7	24	-	-	-	-	-	-
- Kantor Catatan Sipil	37	-	-	-	18	-	-
- Kantor PMD	55	-	-	-	93	-	-
- Kantor PDE	16	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.3. Lanjutan

Kondisi Pemerintahan	Ska	Byl	Skh	Kra	Wng	Srg	Klf
BUMD	3	-	-	-	-	-	-
- PDAM	3	-	-	-	2	-	-
- PD Bank Pasar	-	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN	576	-	-	-	-	-	-
J U M L A H	2.791						

Sumber : BPS ---- (1999). ---- Dalam Angka 1998, diolah kembali.
 -----: Menunjukkan DATI II Surakarta dan Wonogiri.

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS yang ada di Kotamadya Surakarta yang jumlahnya ada 2.791 orang, sebagian besar bekerja pada pos dinas-dinas tertentu (sebanyak 1.402 orang atau sebesar 50,23%), sementara yang bekerja di bagian Setwilda berjumlah 496 orang (17,77%); di bagian Kantor-kantor berjumlah 314 orang (11,25%) serta di pos BUMD dan Kecamatan masing-masing sebanyak 3 orang (0,11%) dan 576 orang (20,64%).

Dari tabel 3.3. di atas juga dapat dilihat bahwa pembentukan dinas-dinas yang akan melayani kebutuhan masyarakat setempat di masa yang akan datang, tidak harus seragam. Sebagai perbandingan di Kotamadya DATI II Surakarta yang tidak memiliki Dinas Pertanian, Perkebunan dan Dinas Perhutanan/Konservasi; di Kabupaten DATI II Wonogiri keberadaan dinas ini sangat diperlukan dan penting. Demikian pula sebaliknya, dinas-dinas yang ada di Kodya DATI II Surakarta tidak harus ada juga di DATI II Wonogiri.

Dalam menyambut pemberlakuan otonomi daerah, memang sudah ada beberapa daerah di Eks-Karesidenan Surakarta yang melakukan perancangan terhadap jumlah dan jenis dinas-dinas yang nanti akan dibentuk. Namun demikian, permasalahan yang muncul justru pada saat menghadapi para pekerja yang dahulunya menduduki suatu dinas, sementara dinas tersebut nantinya tidak akan diperlukan lagi. Permasalahan lain yang muncul yaitu pada saat memikirkan bahwa kebanyakan pegawai yang duduk dalam suatu dinas-dinas tertentu (yang sebenarnya keberadaan dinas tersebut tidak diperlukan), statusnya sebagai PNS Daerah Otonom yang selama ini dibiayai oleh sumbangan/bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi melalui pos SDO (Subsidi Daerah Otonom). Sebagai catatan akhir, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemda di Eks-Karesidenan Surakarta di masa-masa yang akan datang.

D. Kesiapan Pemda DATI II Eks-Karesidenan Surakarta Dalam Menyongsong Desentralisasi

Perubahan pola pemerintahan di bawah UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 telah menimbulkan banyak pergeseran, khususnya terhadap struktur kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pada UU No.22/1999 pergeseran yang terjadi meliputi perubahan *hierarchi* atau urutan kekuasaan birokrasi yang ada, yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara *legislative* dan *executives* (A.R. Karseno, 2000: 3). Pergeseran *hierarchi* pemerintahan ini menimbulkan banyak persoalan dalam mencari *equilibrium baru* dalam penentuan politik atas hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik. Persoalan politik yang muncul antara lain adalah, terputusnya hubungan vertikal antara Bupati dengan Gubernur, dan berubahnya derajat kewenangan Pemerintah Pusat terhadap wakilnya di daerah (Gubernur).

Gubernur yang dulu merupakan kepanjangan tangan kekuasaan Pemerintah Pusat secara penuh dan bertanggung jawab kepada Presiden, sekarang berubah menjadi Perwakilan Pusat di Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian telah terjadi peningkatan kewenangan DPRD terhadap lembaga *executive* di Daerah Propinsi. Sementara itu, di Daerah Otonom seorang Bupati/Walikota yang dahulu merupakan kepanjangan tangan *Executive* Pusat dan Propinsi di Daerah Kabupaten/Kotamadya, sekarang harus bertanggung jawab kepada DPRD setempat.

Dengan adanya perubahan *hierarchi* di atas, maka hubungan antara *executive* di Daerah Otonom dan di Pusat menjadi terpisah sepenuhnya, kecuali dalam bidang-bidang yang masih dipegang oleh Pusat sesuai dengan ketentuan BAB IV, Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 22/1999. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa kewenangan daerah meliputi seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan Keamanan; (3) Peradilan; (4) Moneter dan Fiskal; (5) Agama; serta (6) Kewenangan Bidang Lain. Sementara itu yang termasuk dalam kewenangan bidang lain (pada ayat 2), meliputi: (1) Kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara Makro; (2) Dana Perimbangan Keuangan; (3) Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara; (4) Pembinaan dan Pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia); (5) Pendayagunaan SDA (Sumber Daya Alam) serta Teknologi Tinggi yang Strategis; (6) Konservasi; serta (7) Standardisasi Nasional.

auto-money. Justru yang muncul adalah istilah *Money Follows Function*. Makna dari konsep "*Money Follows Function*", yakni bahwa penyerahan terhadap tanggung jawab pengeluaran ditekankan dan ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian penyerahan terhadap tanggung jawab penerimaan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik pada tingkatan pemerintah pusat (RAPBN: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun pada tingkatan pemerintah daerah (RAPBD: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sesuai dengan UU No.25/1999, Bagian Ketiga, Pasal 6, tentang Dana Perimbangan, di sana mengatur 3 (tiga) Komponen Dana Perimbangan (ayat 1) yaitu: (a) Bagian Daerah [PBB, BPHTB, serta Penerimaan dari Sumber Daya Alam], (b) Dana Alokasi Umum [DAU], serta (c) Dana Alokasi Khusus [DAK]. DAU suatu daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi dari daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (proporsi bobot). Bobot daerah yang dijadikan sarana untuk menentukan besarnya DAU ditentukan berdasarkan hasil kajian empiris dengan memperhitungkan variabel-variabel yang relevan, yang meliputi: (a) Kebutuhan wilayah otonomi daerah, yang dicerminkan antara lain dengan variabel-variabel: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Keadaan Geografi, dan Tingkat Pendapatan Masyarakat dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat Miskin; dan (b) Potensi ekonomi daerah, yang dicerminkan antara lain dengan potensi penerimaan yang diterima daerah dari: Potensi Industri, Potensi Sumber Daya Alam, Potensi Sumber Daya Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karenanya, konsekuensi langsung yang akan terjadi kelak terhadap susunan anggaran pendapatan dan belanja dengan diberlakukannya UU No.25/1999 adalah terjadinya perombakan muatan pos anggaran pendapatan dan belanja, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD). Untuk APBN yang mulai tahun 2000 mengalami perubahan format dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan diterapkan UU No.25/1999 juga akan membawa perubahan format, yaitu dengan masuknya pos Transfer ke Daerah yang berujud Dana Perimbangan (Bagian Daerah, Dana Alokasi Umum [DAU], serta Dana Alokasi Khusus [DAK]) dan Dana Darurat. Operasionalisasi penggunaan Dana darurat telah diatur dalam Bagian Kelima UU No.25/1999, Pasal 16. Dana ini digunakan untuk keperluan yang sifatnya sangat mendesak (misalnya terjadi bencana alam), yang tidak dapat dibiayai oleh Daerah melalui pos APBD.

Sementara untuk format APBD, pos yang dahulu bernama Pemberian/Bantuan Pemerintah Pusat yang berisikan: (1) Bagi Hasil Pajak, (2) Bagi Hasil Bukan Pajak, (3) Subsidi Daerah Otonom (SDO), serta (4) Bantuan Pembangunan); kelak akan berganti nama dengan Dana Perimbangan yang berisikan: (1) Bagian Daerah/Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), serta (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk memberikan gambaran perihal pelaksanaan anggaran daerah sebelum dilaksanakannya UU No.25/1999; bagian berikut akan diungkapkan 3 (tiga) kasus isi atau muatan RAPBD di tiga DATI II Eks-Karesidenan Surakarta.

a. Kasus 1: RAPBD Kotamadya DATI II Surakarta

RAPBD Pemda DATI II Surakarta tahun anggaran 2000 berimbang pada posisi Rp 122,30 miliar. Dari sisi penerimaan terdapat 4 (empat) komponen yaitu:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, sebesar Rp 8,89 miliar atau sebesar 7,3% dari total RAPBD 2000.
2. PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 18,67 miliar atau sebesar 15,3% dari total RAPBD 2000.
3. Pendapatan dari Pemerintah atau Instansi yang Lebih Tinggi sebesar Rp 94,66 miliar atau sebesar 77,4% dari total RAPBD 2000.
4. Lain-lain Pendapatan yang syah sebesar Rp 0,076 miliar atau sebesar 0,1% dari total RAPBD 2000.

Dari gambaran sisi penerimaan, dapatlah disimpulkan bahwa rendahnya pos PAD mencerminkan rendahnya kemampuan Pemda Kotamadya DATI II Surakarta dalam membiayai pembangunan secara keseluruhan seperti yang dirinci pada pos pengeluaran. Dengan merinci pada pos PAD, kita akan tahu sejauh mana potensi yang ada di Surakarta, yang secara ekonomi dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan. Adapun rincian pada pos PAD (dalam satuan miliar rupiah), adalah sebagai berikut:

i. PAJAK DAERAH

Rp 8,49,-

- Pjk Hotel dan Restoran	Rp 2,60,-
- Pjk Hiburan	Rp 0,45,-
- Pjk Reklame	Rp 0,57,-
- Pjk Penerangan Jalan	Rp 4,68,-
- Pjk Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Rp 0,19,-

ii. RETRIBUSI DAERAH**Rp 8,99,-**

- Ret. Pelayanan Kesehatan	Rp 0,91,-
- Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 0,85,-
- Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	Rp 0,23,-
- Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp 0,05,-
- Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum dan Hasil Penderekan	Rp 0,67,-
- Ret. Pasar	Rp 3,40,-
- Ret. Penggantian Bea Cetak Peta	Rp 0,05,-
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 0,33,-
- Ret. Terminal	Rp 1,50,-
- Ret. Tempat Khusus Parkir	Rp 0,04,-
- Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Rp 0,01,-
- Ret. Rumah Potong Hewan	Rp 0,14,-
- Ret. Tempat Rekreasi dan OR	Rp 0,09,-
- Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	Rp 0,55,-
- Ret. Ijin Gangguan	Rp 0,18,-

iii. BAGIAN LABA BUMD**Rp 0,258,-**

- Bank Pembangunan Daerah	Rp 0,000,-
- PDAM	Rp 0,255,-
- PD Bank Pasar	Rp 0,000,-
- Bank Perkreditan Kecamatan	Rp 0,003,-

iv. LAIN-LAIN PAD YANG SAH**Rp 0,933,-**

- Jasa Giro	Rp 0,110,-
- Uang Titipan	Rp 0,394,-
- Hasil Penjualan Dokumen Lelang Direksi Keet	Rp 0,100,-
- Penerimaan dari Cargo Terminal	Rp 0,050,-
- Pemasukan Angsuran Kios Pasar Jongke	Rp 0,037,-
- Pemasukan Angsuran Los Pasar Sidodadi	Rp 0,030,-
- Pemasukan dari Penyelesaian Perumahan Pucang Sawit	Rp 0,062,-
- Penerimaan dari Penataan Tanah	Rp 0,103,-
- Penerimaan Lain-lain	Rp 0,054,-

Dengan melihat pos-pos penerimaan yang lebih rinci, akan dapat diidentifikasi berbagai potensi yang dapat dikembangkan lagi, yang dapat melibatkan masyarakat di wilayah Surakarta khususnya, dan masyarakat di luar Surakarta pada umumnya yang meliputi semua lapisan masyarakat. Misalnya bila kita mengkaji lebih jauh unsur penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran. Dalam pos ini dihasilkan dari 2 (dua) macam sumber yaitu Hotel dan Restoran/Rumah Makan. Di Surakarta terdapat 13 buah Hotel Berbintang; 35 buah Hotel Melati III; 49 buah Hotel Melati II; 26 Hotel Melati I; serta 7 buah Home Stay. Untuk Home Stay dikenakan tarif pajak sebesar 5% dari omzet sedangkan kategori hotel dikenakan 10% dari omzet. Sementara itu kategori rumah makan terdiri dari 16 buah golongan A; 47 buah golongan B; 151 golongan C; serta terdapat 557 buah kategori Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk kategori rumah makan dikenakan tarif 10% dari omzet, sedang kategori PKL dikenakan 5% dari omzet.

Dengan merinci pos penerimaan sampai pada pelaku/obyek yang menjalankan kegiatan; maka kemungkinan menggali potensi ekonomi yang lebih besar lagi di wilayah Surakarta niscaya dapat dilakukan. Tentunya tidak terlepas dari suatu prinsip bahwa pembangunan di segala bidang itu tercipta oleh, dari dan untuk masyarakat di semua lapisan/golongan masyarakat.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran dalam pos RAPBD 2000 Kotamadya DATI II Surakarta terdapat 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Pengeluaran untuk Belanja yang besarnya mencapai Rp 117,2 miliar atau 95,83% dari total RAPBD 2000.
2. Pengeluaran Transfer yang besarnya mencapai Rp 4,3 miliar atau sebesar 3,52% dari total RAPBD 2000.
3. Pengeluaran Tidak Terduga yang besarnya mencapai Rp 0,773 miliar atau sebesar 0,63% dari total RAPBD 2000.

Pos Pengeluaran Belanja terdiri dari pos Belanja Rutin yang besarnya mencapai Rp 60,42 miliar atau 49,40% dari total RAPBD 2000 dan Belanja Pembangunan yang besarnya mencapai Rp 56,8 miliar atau sebesar 46,44% dari total RAPBD 2000. Adapun rincian pos pengeluaran RAPBD 2000 (dalam miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

i. BELANJA RUTIN

	Rp 60,42,-
- <i>Administrasi Umum</i>	<i>Rp 58,02,-</i>
a. Belanja Pegawai	Rp 41,45,-
b. Belanja Barang	Rp 14,74,-

c. Belanja Pemeliharaan	Rp 1,18,-
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp 0,65,-
- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah	Rp 2,39,-

ii. BELANJA PEMBANGUNAN **Rp 56,80,-**

- Sektor Industri	Rp 0,025,-
- Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 0,117,-
- Sektor Tenaga Kerja	Rp 0,050,-
- Sektor Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Keuangan dan Koperasi	Rp 0,509,-
- Sektor Transportasi	Rp 21,909,-
- Sektor Pariwisata dan Telkom Daerah	Rp 0,050,-
- Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali	Rp 2,153,-
- Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp 4,044,-
- Sektor Pendidikan, Keb. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda dan OR	Rp 2,189,-
- Sektor Kependudukan dan KB	Rp 0,012,-
- Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 3,123,-
- Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp 19,757,-
- Sektor Agama	Rp 0,125,-
- Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 0,105,-
- Sektor Hukum	Rp 0,045,-
- Sektor Aparat. Pemerintah & Pengawasan	Rp 2,461,-
- Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 0,100,-
- Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp 0,024,-

iii. PENGELUARAN TRANSFER **Rp 4,31,-**

iv. PENGELUARAN TIDAK TERDUGA **Rp 0,77,-**

Dengan melihat pos RAPBD 2000 di atas, khususnya dengan membandingkan antara pos penerimaan dan pengeluaran, jelaslah bahwa penerimaan Pemda DATI II Surakarta yang bersumber dari PAD yang besarnya mencapai Rp 18,67 miliar tidak dapat digunakan untuk menutup besarnya pos Belanja Pegawai saja yang besarnya mencapai Rp 41,45 miliar. Kecilnya pos PAD ini tidak hanya dialami oleh Kodya Surakarta saja, tetapi hampir di semua DATI II di Indonesia. Sebagai gambaran, dari 26 Propinsi di Indonesia yang PAD-nya lebih dari 50% dari total anggaran hanya berada di propinsi Jawa Barat dan Propinsi Bali.

b. Kasus 2: RAPBD Kabupaten DATI II Sragen

Seperti halnya DATI II Surakarta, sumber dana yang ada pada pos penerimaan APBD DATI II Sragen didominasi oleh besarnya pos Pemberian/Bantuan dari Pemerintah Pusat. APBD DATI II Sragen yang pada tahun anggaran 1998/99 besarnya Rp 96,7 miliar, sebesar Rp 76,1 miliar (78,66%) berasal dari Pemberian/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 50,5 miliar (52,18%) berasal dari dana SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan sebesar Rp 20,3 miliar (21,03%) berasal dari Bantuan Pembangunan. Gambaran selengkapya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Sementara itu sumber dana yang merupakan potensi daerah yang dimasukkan dalam pos PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya berjumlah Rp 8,4 miliar atau sebesar 8,66% dari keseluruhan pendapatan. Dari jumlah tersebut yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 1,4 miliar (1,44%), dan yang berasal dari Retibusi Daerah sebesar Rp 6 miliar (6,21%).

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten DATI II Sragen Tahun Anggaran 1998/99 (dalam juta rupiah)

Jenis Pendapatan	Jumlah	Persentase
A. Pendapatan Rutin	86.917,08	89,91
1. Sisa Anggaran Tahun Lalu	2.501,27	2,59
2. Pendapatan Asli Daerah	8.370,87	8,66
a. Pajak Daerah	1.392,69	1,44
b. Retribusi Daerah	6.006,31	6,21
c. Bagian Laba BUMD	295,87	-
d. Lain-lain Pendapatan	675,99	0,01
3. Pemberian/Bantuan Pemerintah Pusat	76.044,94	78,66
a. Bagi Hasil Pajak	5.250,90	5,43
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	19,73	-
c. Subsidi Daerah Otonom (SDO)	50.445,87	52,18
d. Bantuan Pembangunan	20.328,44	21,03
4. Sumbangan dan Bantuan	0,00	0,00
a. Sumbangan	0,00	0,00
b. Bantuan	0,00	0,00
B. Penerimaan Pembangunan	0,00	0,00
Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	0,00
a. Pinjaman Pemerintah	0,00	0,00
b. Pinjaman untuk BUMD	0,00	0,00
C. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	9.754,06	10,09
Jumlah Tahun 1998/99	96.671,14	100,00
Jumlah Tahun 1997/98	51.172,70	-

Sumber: BPS Kab. Sragen (1999). Kabupaten Dati II Sragen Dalam Angka 1998, hal. 263.

Dari tabel 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Pemda Kabupaten DATI II Sragen terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Sementara itu gambaran pos pengeluarannya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten DATI II Sragen Tahun Anggaran 1998/99 (dalam juta rupiah)

Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
A. Belanja Rutin	60.783,69	65,23
1. Belanja Pegawai	49.379,81	53,00
2. Belanja Barang	5.512,08	5,92
3. Belanja Pemeliharaan	910,28	0,01
4. Belanja Perjalanan Dinas	154,39	-
5. Belanja Lain-lain	2.532,57	2,72
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	146,63	-
7. Ganjaran/Subsidi kpd Pemerintah Bawahan	896,99	0,01
8. Belanja Pensiun dan <i>Onderstand</i>	0,00	0,00
9. Pengeluaran Tdk Terduga Masuk Bag. Lain	368,66	-
10. Pengeluaran Tidak Terduga	882,29	0,01
B. Belanja Pembangunan	22.640,13	24,30
1. Industri	27,00	-
2. Pertanian Rakyat dan Kehutanan	1.316,46	1,41
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	67,00	-
4. Tenaga Kerja	246,00	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	8.698,78	9,34
6. Transportasi	2.931,56	3,15
7. Pertambangan dan Energi	49,94	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	25,50	-
9. Pembangunan Daerah Pemukiman	2.040,01	2,19
10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	627,39	0,01
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME dan Olah Raga	3.972,35	4,26
12. Kependudukan dan Keluarga Berencana	2,00	-
13. Kesenian, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	331,98	-
14. Perumahan dan Pemukiman	284,76	-
15. A g a m a	24,00	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	91,75	-
17. H u k u m	18,00	-
18. Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	1.812,06	1,95
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media	57,10	-
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	16,50	-
C. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	9.754,06	10,47
Jumlah Tahun 1998/99	93.177,88	100,00
Jumlah Tahun 1997/98	49.683,88	-

Sumber: BPS Kab. Sragen (1999). Kabupaten Dati II Sragen Dalam Angka 1998, hal. 264-5.

Dari tabel 4.2 di atas, kita dapat melihat bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten DATI II Sragen pada periode yang sama, menunjukkan jumlah angka sebesar Rp 93,2 miliar. Dari jumlah anggaran belanja tersebut, sebesar Rp 60,8 miliar (65,23%) digunakan untuk keperluan Belanja Rutin; sedang sebesar Rp 22,6 miliar (24,3%) dialokasikan untuk Belanja Pembangunan. Komponen terbesar pada pos Belanja Rutin terserap untuk membayar Gaji Pegawai, yaitu sebesar Rp 49,4 miliar (53,00%).

Dari gambaran pos belanja pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa bila UU No.25/1999 diterapkan maka masalah gaji/upah pegawai yang menyerap sebagian besar dari belanja rutin akan mengalami banyak permasalahan, selama upaya menggali potensi dari daerahnya sendiri tidak berhasil dengan baik. Hal ini dilandasi pada pemikiran bahwa pos belanja rutin yang sangat besar selama ini, banyak ditopang oleh sumber dana dari Pemberian/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

c. Kasus 2: RAPBD Kabupaten DATI II Boyolali

Seperti halnya di Kotamadya DATI II Surakarta, nilai anggaran pada pos PAD yang ada di Kabupaten DATI II Boyolali juga masih relatif kecil. Jumlah PAD yang hanya sebesar Rp 9,09 miliar; dihasilkan dari pos Pajak Daerah sebesar Rp 1,69 miliar (18,57% dari total PAD); dari pos Retribusi Daerah sebesar Rp 6,63 miliar (72,95% dari total PAD); dari pos Laba BUMD sebesar Rp 0,27 miliar (2,98% dari total PAD); serta dari pos Penerimaan Lain-lain sebesar Rp 0,49 miliar (5,50% dari total PAD). Gambaran besarnya PAD di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel 4.3.

Sementara itu realisasi Jenis Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten DATI II Boyolali, menunjukkan bahwa bantuan berupa SDO (Subsidi Daerah Otonom) menempati kedudukan yang paling tinggi. Dari sejumlah bantuan total yang besarnya mencapai Rp 68,85 miliar, yang dialokasikan sebagai dana SDO sebesar Rp 52,95 miliar atau sebesar 76,90% dari total bantuan Pemerintah Pusat. Sedang yang dialokasikan sebagai dana Bantuan Pembangunan sebesar Rp 10,6 miliar atau sebesar 15,40% dari total bantuan Pemerintah Pusat. Di lain pihak Jumlah Dana Urusan Kas dan Perhitungan, yang besarnya Rp 10,41 miliar sebagian besar berasal dari Iuran Wajib Pegawai (sebesar 33,35%); dan Potongan Beras (sebesar 43,70%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten DATI II Boyolali Tahun Anggaran 1998/99 (dalam juta rupiah)

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah	Persentase
A. Pajak Daerah	1.687,12	100,00
1. Pjk Hotel dan Restoran	63,45	3,76
2. Pjk Hiburan	5,04	-
3. Pjk Reklame	40,15	2,38
4. Pjk Penerangan Jalan	1.474,87	87,42
5. Pjk Galian Golongan C	26,19	1,55
6. Pjk ABT dan APT	77,42	4,59
Jumlah Pajak Daerah	1.687,12	100,00
B. Retribusi Daerah	6.627,92	100,00
1. Ret. Pelayanan Kesehatan	333,80	5,04
2. Ret. Pelayanan Persampahan	164,01	2,48
3. Ret. Bea Cetak KTP dan Akte	97,45	1,47
4. Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	35,38	0,01
5. Ret. Pasar	485,53	7,33
6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	79,57	1,20
7. Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	119,51	1,80
8. Ret. Terminal	151,16	2,28
9. Ret. Rumah Potong Hewan	275,09	4,15
10. Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	55,24	0,01
11. Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	13,83	-
12. Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	40,93	0,01
13. Ret. Ijin Gangguan	31,03	0,01
14. Ret. Swadana Rumah Sakit Umum	4.745,39	71,60
Jumlah Retribusi Daerah	6.627,92	100,00
C. Bagian Laba BUMD	271,16	100,00
1. Bank Pembangunan Daerah (BPD)	84,68	31,23
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	50,00	18,44
3. Perusahaan Daerah Aneka Karya	11,50	4,24
4. Perusahaan Daerah Bank Pasar	82,37	30,38
5. Dinas Kebersihan Kota (DKK)	42,61	15,71
Jumlah Laba BUMD	271,16	100,00
D. Penerimaan Lain-lain	499,62	5,50
Jumlah Total	9.085,82	100,00

Sumber: BPS Kab. Boyolali (1999). *Kabupaten Boyolali Dalam Angka 1998*, hal. 216-220.

Tabel 4.4. Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten DATI II Boyolali serta Dana Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1998/99 (dalam juta rupiah)

Jenis Bantuan dari Pemerintah Pusat	Jumlah	Persentase
A. Bagi Hasil Pajak	5.190,43	7,54
B. Bagi Hasil Bukan Pajak	109,64	-
C. Subsidi Daerah Otonom (SDO)	52.949,36	76,90
1. Belanja Pegawai	50.470,62	95,32
2. Belanja Non-Pegawai	2.090,67	3,95
3. Bantuan kepada Desa / Kalurahan	340,04	0,01
4. Bantuan Dati I untuk Dinas dan P&K	48,03	-
D. Bantuan Pembangunan	10.603,20	15,40
1. Bantuan Pembangunan DATI II	8.752,42	82,55
2. Bantuan Pembangunan SD	1.217,67	11,48
3. Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan	213,48	2,01
4. Bantuan Penyediaan Air Bersih	96,05	0,01
5. Bantuan Penyehatan Lingkungan / Masyarakat Miskin	50,99	0,01
6. Bantuan Pembangunan Daerah dari DATI I	272,59	2,57
7. Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Bantuan dari Pemerintah Pusat	68.852,63	100,00

Dana Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	Jumlah	Persentase
1. Iuran Wajib Pegawai	3.472,43	33,35
2. Potongan Beras	4.550,02	43,70
3. Penerimaan PPH Pasal 21	1.578,63	15,16
4. Penerimaan Amal Bakti KORPRI	14,58	-
5. Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Umum Pegawai	593,50	5,70
6. Penerimaan Kembali Panjar (Uang Muka) Kerja	2,79	-
7. Potongan Biaya Pemungutan PBB	200,07	1,92
8. Penerimaan untuk Pihak Ketiga	0,00	0,00
9. Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Urusan Kas dan Perhitungan	10.412,02	100,00

Sumber: BPS Kab. Boyolali (1999). Kabupaten Boyolali Dalam Angka 1998, hal. 216-220.

Sebagai catatan akhir, dengan pelaksanaan desentralisasi perlu adanya penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik yang tersedia. Hasil dari kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang munculnya berbagai kegiatan ekonomi.

2. Analisis SWOT: Potensi dan Kendala Desentralisasi [Kasus Pemda DATI II Surakarta]

Pemerintah Daerah Kotamadya DATI II Surakarta, di masa mendatang memiliki prospek yang cukup baik dan memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang, khususnya dalam menghadapi pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Beberapa alasan yang dapat diungkapkan di sini antara lain, yaitu:

- a. Kota Surakarta merupakan kota penghubung jalur transportasi antara Jakarta dan Surabaya, terutama yang melewati jalur Selatan. Dampak dari kegiatan ini, yaitu bahwa kota Surakarta selain dapat dijadikan sebagai kota transit juga merupakan kota untuk melakukan berbagai transaksi ekonomi. Hal ini juga ditunjang oleh berbagai fasilitas-fasilitas pendukung, seperti: terminal peti kemas, terminal bus, terminal kereta api, bandar udara Adi Sumarmo, dan lain sebagainya.
- b. Kota Surakarta sebagai pusat berbagai kegiatan bagi daerah sekitarnya. Hal ini juga didukung oleh keberadaan fasilitas pendidikan, baik berupa Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sebelas Maret) maupun Perguruan Tinggi Swasta yang lain. Demikian pula keberadaan fasilitas hiburan, perkantoran, perdagangan dan fasilitas budaya dan wisata yang dapat memberikan pelayanan, bukan saja bagi penduduk Surakarta tetapi juga bagi masyarakat di sekitar Surakarta.
- c. Melalui program Panca Krida Utama, --yaitu dijadikannya kota Surakarta sebagai: (1) Kota Budaya; (2) Kota Tujuan Wisata [Pintu Gerbang Wisata Jawa Tengah]; (3) Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa; (4) Kota Industri, terutama pada Industri Kecil / Kerajinan Rakyat; serta (5) Kota Pendidikan dan Ketrampilan--, Pemda Kotamadya Surakarta dapat menggali potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, kendala dan tantangan Pemda Kotamadya DATI II Surakarta dalam menghadapi desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan di bidang kependudukan, yang antara lain meliputi:
 - (i) Penyebaran penduduk yang tidak merata; (ii) Pendapatan masyarakat yang masih rendah [masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran]; (iii) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia [dominasi tingkat pendidikan formal penduduk masih pada pendidikan dasar]; (iv) Tingkat kesehatan masyarakat belum memadai; serta (v) Tingginya Tingkat pelajo dan peboro dari daerah sekitar Surakarta.
- b. Masalah keseimbangan lingkungan hidup dan pelestarian alam, yang diwujudkan dengan: (i) Menurunnya daya dukung lingkungan hidup karena tingginya tingkat pencemaran; (ii) Tingginya tingkat kepadatan bangunan di wilayah bagian Selatan; serta (iii) Terbatasnya sumber daya alam.
- c. Masalah aparatur pemerintah, yang ditunjukkan oleh: (i) Masih rendahnya kepemilikan brevet jabatan; (ii) Belum optimalnya fungsi organisasi dan tata laksana pemerintahan; (iii) Rendahnya disiplin dan etos kerja; serta (iv) Kurang tercukupinya sarana dan prasarana kerja pegawai.
- d. Masalah prasarana kota, yang digambarkan dengan: (i) Tidakseimbangnnya tingkat pembangunan antara wilayah utara dan selatan; (ii) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pemukiman; serta (iii) Belum memudahinya fasilitas pelayanan kota.
- e. Masalah sosial kemasyarakatan, dengan rincian masalah: (i) Masih tingginya penyakit sosial di masyarakat; (ii) Belum memudahinya derajat kesehatan masyarakat; (iii) Belum optimalnya tingkat partisipasi wanita dalam pembangunan; serta (iv) Belum optimalnya tingkat partisipasi generasi muda dalam pembangunan.
- f. Masalah Dunia Usaha, yang ditunjukkan oleh: (i) Masih rendahnya tingkat inovasi dan rekayasa usaha; (ii) Rendahnya penguasaan pasar; (iii) Rendahnya daya saing produk usaha kecil dan rumah tangga; serta (iv) Rendahnya semangat dan jiwa kewirausahaan.
- g. Masalah dana pembangunan, yang ditunjukkan oleh: (i) Nilai PAD masih sangat rendah dibanding dengan Nilai Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan; (ii) Belum menunjangnya iklim investasi karena berbagai faktor, yang antara lain berupa faktor kea-

manan dan ketidakpastian usaha; (iii) Masih lemahnya kemampuan perusahaan daerah dalam membantu menyediakan dana untuk pembangunan; serta (iv) Banyaknya fasilitas-fasilitas sumber penerimaan daerah yang mengalami kerusakan.

E. Penutup

Dari beberapa permasalahan dan uraian yang telah dipaparkan secara panjang lebar di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

- a. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya bangunan politik modern. Dengan kata lain adanya pembagian kekuasaan akan mengurangi tingkat peyalahgunaan wewenang, yang selama ini mengumpul di Pusat Pemerintahan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan mengurangi tekanan ketidakadilan, mendorong keinginan daerah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah; serta memberi dorongan ke arah munculnya iklim demokratisasi.
- b. Kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya, dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini dicerminkan oleh besarnya PAD yang rata-rata masih relatif sedikit dibanding dengan proporsi dana yang berasal dari pos Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pola pembangunan sentralistik yang selama ini diterapkan, di samping menghilangkan kreativitas masyarakat di daerah juga telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.
- c. Walaupun dalam UU No.25/1999 telah ditetapkan perihal sumber-sumber keuangan daerah, pada kenyataannya daerah belum memiliki keleluasan untuk menggali sendiri sumber-sumber keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan turunya undang-undang yang membatasi jumlah dan jenis macam pajak/retribusi yang dapat ditarik oleh daerah.
- d. Masih banyak kendala dan tantangan Pemda dalam menghadapi desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah. Selain permasalahan SDM yang umumnya masih rendah, Pemda juga belum mempunyai cara-cara yang tepat dan baik untuk menggali potensi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Karseno (2000). "Persoalan-Persoalan dalam Implementasi Otonomi Daerah". *Makalah* disampaikan pada Seminar Otonomi Daerah, yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi UNS, Surakarta: 8 April.
- BPS Surakarta (1999). *Kotamadya Surakarta Dalam Angka 1998*. Surakarta: BPS Surakarta.
- BPS Surakarta (1999). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1998*. Surakarta: BPS Surakarta.
- Dedi M. Masykur Riyadi (2000). "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Kaitannya dengan Kewenangan, Kemampuan Keuangan, dan Pengembangan Potensi Daerah". *Makalah* disampaikan pada Seminar Otonomi Daerah, yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi UNS, Surakarta: 8 April.
- Mulyanto (2000). "Implementasi Konsep *Money Follows Function* terhadap Reformasi Muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja". *Makalah* disampaikan dalam acara: "DISKUSI INTENSIF OTONOMI DAERAH" yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi UNS Surakarta: 24 April.
- "Menggali Potensi Kotamadya DATI II Surakarta: Beberapa Permasalahan di Bidang Ekonomi". *Makalah* disampaikan dalam Pertemuan Multidisiplin yang diadakan oleh Fakultas Teknik UNS, Surakarta: 13 Mei.
- BAPPEDA Surakarta - P3E FE-UNS (2000). *Rencana Strategis Pembangunan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2000/01-2004/05*. Surakarta: BAPPEDA Surakarta.
- *Evaluasi dan Analisa Keadaan (EAK) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 1999/2000*. Surakarta: BAPPEDA Surakarta.

Lampiran 1. Perbandingan Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Menurut Aturan Lama dan Aturan Baru (dalam persen)

No.	Jenis Dana Perimbangan	Aturan Lama		Aturan Baru (UU No. 25 / 1999)		Semua Pemhasil	Lainnya	
		Pusat	Propinsi Kab/Kota	Pusat	Propinsi Kab/Kota			
1.	Bagian Daerah * Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) * Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) * Sumber Daya Alam a. Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan / Iuran Hasil Hutan - Iuran Hak Pengusahaan Hutan b. Pertambangan (Batubara, Emas) - Iuran Tetap (Land Rent) - Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) c. Royalty Perikanan d. Royalty Migas - Minyak Bumi - Gas Alam e. Agraria Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)	10,0 20,0 55,0 30,0 20,0 20,0 - 100,0 100,0 40,0 - -	16,2 16,0 30,0 70,0 16,0 16,0 - - - 20,0 - -	64,8 64,0 15,0 - 64,0 64,0 - - - 20,0 - -	16,2 16,0 30,0 70,0 16,0 16,0 - - - 20,0 - -	10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 85,0 70,0 100,0 75,0 -	64,8 64,0 - - - - 80,0 - - - - - -	- - 32,0 64,0 64,0 32,0 - 6,0 12,0 - - -
2.								
3.								

Sumber: - UU No. 25 / 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Lampiran Makalah Dedi M. Masykur Riyadi & A.R Karseno yang disampaikan dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah FE-UNS di Hotel Quality, Sabtu: 8 April 2000.

Lampiran 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) untuk Setiap Daerah Propinsi di Indonesia menurut Kriteria UU No. 25/1999 (dalam juta rupiah)

Propinsi	Hutan	Tambang	Ikan	Hasil Migas			Total
				Minyak	Gas	Total	
01 Aceh	55.882	0	2.650	268.417	36.256	304.674	363.206
02 SUMUT	32.683	0	4.505	32.825	4.434	37.259	74.447
03 SUMBAR	24.055	11.437	3.710	0	0	0	39.202
04 Riau	51.494	9.448	1.855	974.890	131.682	1.106.572	1.169.371
05 Jambi	23.505	0	1.590	7.353	993	8.346	33.441
06 SUMSEL	47.268	54.488	2.650	109.063	14.732	123.795	228.201
07 Bengkulu	6.443	4.583	1.060	0	0	0	12.088
08 Lampung	4.109	45	1.855	0	0	0	6.009
09 DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
10 JABAR	14.396	262	6.890	266.225	35.960	302.185	323.733
11 JATENG	78.082	0	9.275	2.710	366	3.076	90.433
12 DIY	100	0	1.325	0	0	0	1.595
13 JATIM	23.322	206	9.805	3.446	466	3.912	37.245
14 KALBAR	79.863	2.187	1.855	0	0	0	83.905
15 KALTENG	129.633	9.217	1.590	0	0	0	140.439
16 KALSEL	19.669	45.734	2.650	2.128	287	2.415	70.467
17 KALTIM	194.626	140.172	1.855	513.405	69.299	582.344	918.998
18 SULUT	13.855	7.860	1.855	0	0	0	23.570
19 SULTENG	15.525	0	1.325	0	0	0	16.850
20 SULSEL	3.076	30.644	6.095	0	0	0	39.815
21 Sul Tenggara	5.479	4.033	1.325	0	0	0	16.850
22 Bali	71	0	2.385	0	0	0	2.456
23 NTB	5.437	0	1.855	0	0	0	7.292
24 NTT	2.255	0	3.445	0	0	0	5.700
25 Maluku	26.476	13.020	1.325	1.655	224	1.879	42.701
26 IRJA	60.305	325.845	2.650	21.428	2.894	24.322	413.123
T O T A L	917.615	659.181	77.380	2.203.186	297.593	2.500.779	4.155.124

Sumber: Robert Simanjuntak (11 Maret 2000), Supplement pada: "In Depth Workshop Fiscal Decentralization", IRIS-LPEM FEUI, Jakarta: 5-14 Maret 2000.